

Tipe Koleksi: UHAMKA - Skripsi FIKES

Analisis Spasial Kasus Campak di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 dan 2019 (Analisis Data Sekunder Surveilans Campak Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat)

Shafira Permata Radiani

Deskripsi Lengkap: <http://lib.uhamka.ac.id/detail.jsp?id=75534&lokasi=lokal>

Abstrak

Campak merupakan salah satu penyakit menular yang sering menimbulkan kejadian luar biasa di Indonesia. Kasus campak di Kalimantan Barat pada tahun 2018 sebanyak 118 kasus dan meningkat di tahun 2019 sebanyak 144 kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis distribusi kasus campak dan faktor risiko melalui analisis spasial dan statistik. Dengan desain studi ekologi yang digunakan, didapatkan sampel penelitian adalah seluruh kasus campak di 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 dan 2019. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi data sekunder di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. Analisis data dilakukan secara spasial dan secara statistik dengan uji korelasi spearman. Hasil analisis spasial ditemukan bahwa kasus campak terjadi di kabupaten/kota dengan kepadatan penduduk yang rendah, sedang, dan sangat tinggi. Kasus campak berdasarkan tingkat pendapatan banyak ditemukan di kabupaten/kota dengan tingkat pendapatan yang tinggi dan sangat tinggi banyak ditemukannya kasus campak. Selain itu, kasus campak banyak terjadi di kabupaten/kota dengan cakupan imunisasi campak yang rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pendapatan dengan kasus campak di tahun 2019 ($p = 0,000$) yang memiliki hubungan positif di tahun 2018 dan 2019. Korelasi kepadatan penduduk dengan kasus campak menunjukkan hubungan positif di tahun 2018 dan 2019. Selain itu, korelasi negatif antara cakupan imunisasi campak dengan kasus campak ditunjukkan di tahun 2019. Peningkatan pelayanan imunisasi dan kampanye imunisasi campak diperlukan di kabuapten/kota dengan kasus campak yang banyak. Kerja sama atas lintas sektor juga diperlukan untuk memperbaiki sistem perencanaan tata kota di kabupaten/kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi.